

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan kata yang sudah sering terdengar di kalangan masyarakat umum. Dalam berbagai perbincangan, demokrasi banyak diucapkan dalam berbagai peristiwa dan konteks. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “demos” yang bearti rakyat dan “kratos/cratein” yang bearti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata “demos” biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala bearti menjadi orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin, kata demokrasi pada mulanya digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan (Yudi Latif, 2011: 395).

Hal ini yang mendasari konsep demokrasi seperti yang diungkapkan oleh Abraha Lincoln yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga konsep dasar demokrasi adalah rakyat yang berkuasa. Dijelaskan oleh Rosyada, dkk (2003:67) “ Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat, bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan rakyat”

Menurut Haris Soche (Winarno, 2010:91) demokrasi adalah bentuk pemerintah rakyat, karena itu kekusaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada kekuasaan rakyat, demokrasi dalam pemerintahan meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.

Dalam pandangan Civic Education menjelaskan demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat (Winataputra dan Budimansyah, 2012:214)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan sebuah karya yang dibuat oleh manusia, dimana berawal dari munculnya sebuah ide, menjadikan peraturan melalui norma yang mengikat, menjadikan sebuah prinsip suatu sistem sosial, sehingga menciptakan sebuah wawasan, dari wawasan tersebut menjadikan sikap dan perilaku dalam masyarakat.

2. Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sehingga mendukung sistem politik demokrasi. Perilaku demokratis terkait dengan nilai-nilai demokratis. Perilaku yang bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Nilai atau kultur demokrasi sangat penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara. Nilai-Nilai dan

kultur demokrasi menurut Zamroni (Maftuh 2007 : 7) adalah sebagai berikut :

- a. Toleransi
- b. Bebas mengemukakan pendapat
- c. Memahami keanekaragaman Masyarakat
- d. Terbuka dalam berkomunikasi
- e. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
- f. Percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain
- g. Saling menghargai
- h. Mampu mengekang diri
- i. Kebersamaan dan keseimbangan

Sedangkan nilai-nilai demokrasi menurut Cipto (Taniredja, 2014:59-60) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa percaya (Trust), dan kerjasama. Lebih lanjut disampaikan oleh Muhamain (Taniredja, 2014: 63) nilai yang penting dalam demokrasi yaitu “kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah berdasar asas saling menghargai dan ketundukan kepada rule of law yang pada akhirnya dapat menjamin terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia Indonesia.”

Nilai atau kultur demokrasi tersebut sangat penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara. Demokrasi dapat dibentuk dari nilai-nilai demokrasi. Menurut Hendry B. Mayo (Winarno, 2010:98) menyebutkan delapan nilai demokrasi, sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- c. Pergantian penguasa dengan teratur.
- d. Penggunaan paksaan sedikit mungkin
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman
- f. Menegakkan keadilan
- g. Memajukan ilmu pengetahuan
- h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Nilai-nilai demokrasi ini sebenarnya telah lama tertanam pada masyarakat khususnya dalam berbagai budaya dan suku-suku bangsa Indonesia. Ini tercermin dalam kata “Musyawarah”, dimana terdapat nilai-nilai demokrasi yang melekat didalamnya seperti adanya kebebasan mengemukakan pendapat, toleransi yang dijunjung tinggi, saling menghargai antar satu dengan lain, serta adanya kebersamaan dalam mencapai keputusan bersama. Disampaikan oleh Bung Hatta (1953:39), “bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi yang berlandaskan pada nilai rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja yang absolut, hal itu bisa disebut sebagai Demokrasi asli bangsa Indonesia”.

Hatta dikenal sebagai penegak demokrasi politik dan demokrasi ekonomi bagi bangsa Indonesia. Pemikiran Hatta tentang demokrasi sudah tentu diperuntukan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Konsep

Hatta mengenai nilai demokrasi dikemukakan oleh Zubaidi (2011:24) dalam Jurnal Filsafat, nilai yang mendasari demokrasi bagi Hatta antara lain :

- a. Nilai fundamental yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan.
- b. Nilai kenikmatan material yaitu keadilan sosial yang berasal dari penjabaran nilai keadilan. Terkait dengan konsep demokrasi, persoalan keadilan sosial ini dijabarkan sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang dipraktekan dalam bentuk koperasi.
- c. Nilai Vital yaitu penjabaran dari nilai kebenaran. Demokrasi harus berpijak pada kebenaran, baik kebenaran dalam proses pemilihan para pemimpin maupun dalam setiap penagmbilan kebijakan oleh para pemimpin itu.
- d. Nilai Spiritual (kejiwaan), yaitu dapat dijabarkan dari nilai keadilan, kebaikan, kejujuran dan keindahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-Nilai demokrasi tersebut dijadikan sebagai pilar berdemokrasi di Indonesia.

B. Tinjauan Pendidikan Demokrasi

1. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi merupakan sebagian upaya dalam menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan, sikap serta keterampilan demokrasi. Dimana upaya tersebut mempunyai tujuan yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Seperti yang disampaikan oleh Winaputra dan Budimansyah (2012:232):

“Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks dalam hal ini untuk pendidikan formal (sekolah), non formal (pendidikan di luar sekolah), dan Informal (pergaulan dirumah dan masyarakat) mempunyai visi sebagai wahana substantive, pedagogis, dan sosialkultural untuk membangun cita-cita, nilai dan konsep, prinsip, sikap dan keterampilan demokrasi dalam diri warganegara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

Upaya untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi melalui jalur pendidikan formal salah satunya dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, karena menurut Zamroni (Wantoro, 2008:216) “ Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melali aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak warga masyarakat”. Demokrasi ini mengajarkan bagaimana cara hidup secara bersama bagi individu-individu yang berpartisipasi sebagai bagian dari suatu masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan demokrasi ini sejalan dengan kurikulum PKn, dimana kurikulum PKn yang diterapkan di sekolah-sekolah terkandung makna sosialisasi, aktualisasi konsep, sistem, budaya serta praktik demokrasi dan keadaban. Praktik kurikulum PKn dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat (Chamim, 2006 : 15-16)

Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang demokratis hanya terwujud jika warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat dan karakter yang mendukung demokrasi. Dijelaskan oleh Zamroni (2013:19) dimana karakteristik warga negara yang memiliki watak dan jiwa demokratis, antara lain :

- a. Memiliki kemampuan memahami perbedaan, masing-masing individu berhak menjadi dirinya sendiri, dan pengakuan atas kesetaraan, yang tidak ada seseorang lebih superior atas yang lain.
- b. Memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang berbagai perbedaan.
- c. Memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai dan senang berkomunikasi serta mengambil keputusan secara demokratis.

d. Memiliki kesadaran hukum, memiliki tanggung jawab sebagai warga negara dan analitis untuk menyampaikan gagasan dan menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun.

Dalam Demokrasi itu sendiri banyak hal seperti menghargai perbedaan, sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia dan semangat Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Kegotongroyongan, saling menghargai, menerima perbedaan, keterbukaan, kebersamaan, dan saling kerjasama merupakan ciri bangsa Indonesia yang sejalan dengan Demokrasi. Watak dan jiwa demokrasi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, melainkan perlu adanya suatu cara untuk menumbuhkan serta mengembangkannya.

Menurut Winaputra dan Budimansyah (2012:223) pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Sedangkan pengertian pendidikan demokrasi lebih luas dijelaskan menurut Zamroni (2013:22-23), dapat dilihat sebagai suatu proses memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktikkan kehidupan yang demokratis baik di kelas, di sekolah, maupun masyarakat, dengan tujuan agar para siswa memahami bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud jika warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat dan karakter yang mendukung demokrasi.

Menurut UNESCO (Tukiran taniredja, 2014:72) maksud dari pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada kepercayaan, dan kebudayaan orang-orang lain, penghormatan pada individualitas, promosi peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan dan beribadat. Sedangkan pengertian pendidikan demokrasi lebih khusus dijelaskan menurut

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pendidikan demokrasi dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap demokratis di dalam pembelajaran, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat, dimana nilai dan sikap demokratis nantinya akan berguna bagi dirinya untuk iut aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkenaan dengan hal tersebut menurut Gandal dan Fin (Winataputra dan Budimansyah, 2012: 231-232) perlunya mengembangkan model school-based democracy education paling tidak dalam empat alternatif bentuk :

- a. Perhatian yang cermat diberikan pada the root and branches of the democratic idea atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi
- b. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktiik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu
- c. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu
- d. Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memili wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

2. Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Pertama

Dalam pelaksanaannya di sekolah pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, aktualisasi maupun praktik demokrasi secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin (2007:14) bahwa “ Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut

sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan praktik konsep, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Praktik konsep, nilai, budaya, dan praktik demokrasi dapat dilaksanakan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini seperti di istilahkan oleh Winataputra (Wantaro, 2008:216) bahwa “ pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratarium demokrasi dimana semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-ita dan nilai demokrasi diterapkan secara aktif”. Dengan pembelajaran mata pelajaran PKn ini, pendidikan demokrasi dapat diberikan kepada siswa secara formal

Dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran. Komponen Pembelajaran yang disampaikan Komalasari (2010:3) diantaranya adalah tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasi kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran.

Pendidikan demokrasi dapat dilakukan memlaui komponen-komponen dalam pembelajaran. Anjani (2014:21-26) menemukan pengemasan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui materi pembelajaran demokrasi dan metode demokrasi PKn

Materi Pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat di Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan. Dalam Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PKN meliputi beberapa Standar Kompetensi, yaitu :

- a. Kelas VII semester I meliputi Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara, Norma dan Keadilan, dan Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kelas VII semester 2 meliputi Keberagaman Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Uja, Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan, dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelas VIII semester 1 meliputi, menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional. Sedangkan kelas VIII semester 2 meliputi, memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintah di Indonesia.
- c. Kelas IX semester 1 meliputi, menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara, dan memahami pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan kelas IX semester 2 meliputi, memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa materi pembelajaran PKn mengenai demokrasi terdapat di kelas VIII semester 2. Standar Kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan memiliki beberapa Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dalam Permendikbud No 37 tahun 2018, Standar Kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan berisi beberapa Kompetensi Dasar, diantaranya.

- a. Mendemonstrasukan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional-nasional di Indonesia
- b. Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Menurut Winarno (2014:122-193) Standar Kompetensi diatas termasuk di dalam dimensi pengetahuan kewarganegaraan dan dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan siswa dan nilai kewarganegaan siswa.

Dalam dimensi pengetahuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. Menjelaskan hakikat demokrasi.
- c. Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara

Selanjutnya Kompetensi Dasar menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan, merupakan Kompetensi Dasar yang lebih ditujukan untuk mengembangkan kompetensi karakter, kewarganegaraan siswa. Winarno (2014:193) menyampaikan dimensi sikap dan nilai kewarganegaraan siswa (civic disposition) pada PKn sekolah SMP/MTs diantaranya adalah memiliki sikap positif terhadap demokrasi.

Dalam Standar Isi PKn 2018, materi pembelajaran PKn sekolah disebut sebagai ruang lingkup PKn. Ruang lingkup PKn ada delapan yang meliputi: persatuan dan kesatuan, norma dan hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi.

Sebagai pendidikan demokrasi, dalam pembelajaran PKn seharusnya menghadirkan materi yang tidak hanya bersifat teori akan tetapi juga terkait dengan realitas masyarakat. Seperti yang disampaikan Zamroni (2013:23-24) di atas “ materi pendidikan demokrasi yang dibawa ke ruang-ruang kelas tidak hanya bersifat pengetahuan teoretis murni melainkan dipadukan controversial issue yang tengah merebak dimasyarakat.”

Materi atau isi pembelajaran dalam pendidikan demokrasi yang seharusnya dihadirkan untuk siswa adalah materi yang berkaitan dengan demokrasi yang aktual pada masyarakat atau dengan kata lain merupakan controversial issue yang tengah merebak dimasyarakat. Mengenai hal ini,

diperlukannya peran guru dalam membawa controversial issue di dalam materi pembelajaran. Zamroni (2013:171) menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan realitas masyarakat atau controversial issue harus dibawa guru di dalam kelas, yaitu:

“ Pemerintahan yang demokratis memerlukan diskusi secara terus menerus atas controversial issue, apabila masyarakat membiarkan dan tidak mau tahu controversial issue akibatnya sangat mungkin akan muncul kebijakan yang jelek, terdapat hubungan yang bersifat mendasar, bahkan dapat dikatakan tanpa membahas controversial issue tidak ada demokrasi.

Oleh karena itu, tugas guru untuk senantiasa memberikan materi dengan mengaitkan dengan kenyataan dan menyajikan controversial issue atau realitas masyarakat di dalam penyampaian materi pembelajaran, agar siswa mengkaji sesuatu dari berbagai aspek. Dengan cara demikian diharapkan akan mampu menggugah dan merangsang siswa untuk mengeluarkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran cerdas dan kreatif untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi serta nantinya diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap dan keterampilan demokratis.

Pembelajaran seperti ini menurut Winarno (2014:76) dinamakan sebagai pembelajaran kontekstual (contextual teaching learning) merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, agar siswa mampu

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga teori-teori yang akan di dapatkan siswa di dalam pembelajaran tidak akan menemui kesenjangan dengan kenyataan di kehidupan masyarakat.

Pembelajaran kontekstual dapat mendorong adanya pembelajaran demokratis, hal ini seperti yang diungkapkan Komalasari (2011:52) dalam jurnal MIMBAR bahwa kuatnya hubungan antara pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan dengan kompetensi dapat dianalisis dari berbagai hal :

- a. Pembelajaran Kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan bersifat alamiah bagi peserta didik. Pembelajaran kontekstual merangsang otak untuk mengkonstruksi pola-pola pengetahuan melalui keterkaitan dengan konteks realita kehidupan peserta didik.
- b. Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan membelajarkan prinsip hidup warga negara. Peserta didik dihargai sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan sebagai warga negara
- c. Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan mendukung penciptaan democratic learning. Artinya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembelajaran demokrasi dalam rangka mengembangkan peserta didik menjadi warga negara demokratis yang cerdas, bertanggung jawab dan partisipatif. Prinsip-prinsip demokrasi dimasukkan dalam content sekaligus diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan

kewarganegaraan dan bersinergi dengan kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler di sekolah.

Kegiatan atau pembiasaan praktik demokrasi bagi siswa di pembelajaran PKn dapat dilakukan melalui penggunaan metode. Metode merupakan salah satu dari komponen pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Supriade dan Deni Darmawan (2012:135) diantaranya adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, karyawisata, pemberian tugas (resitasi), latihan, eksperimen, problem solving dan sebagainya.

Sedangkan Komalasari (2011:56) menyebutkan bahwa metode pembelajaran diantaranya adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman apangan, brainstorming, debat, simposium dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa metode di dalam pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Komalasari (2011:56) bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai pembelajaran.

Pemilihan metode yang sesuai dapat dijadikan sebagai pendorong pelaksanaan pendidikan demokrasi di dalam pembelajaran. Seperti yang dijelaskan Damayanti (2016:10) dalam penelitiannya, bahwa faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan demokrasi dalam

pembelajaran diantaranya adalah penggunaan metode pembelajaran yang sesuai.

Melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan demokrasi diharapkan siswa memiliki kompetensi kewarganegaraan, yaitu seperti kompetensi pengetahuan kewarganegaraan, kompetensi kecakapan kewarganegaraan, kompetensi watak kewarganegaraan. Kompetensi-kompetensi kewarganegaraan siswa yang dihasilkan melalui pembelajaran PKn dapat dilihat dari hasil penilaian.

3. Visi dan Misi Pendidikan Demokrasi

Visi pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan ketrampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan wawasan dan pengalamannya itu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama warga negara mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Berdasarkan pada visi tersebut, Winataputra (Bambang Yudianto 2018, 34) merumuskan misi pendidikan demokrasi adalah :

- a. Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks

kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (well-informed).

- b. Memfasilitasi warga negara untuk melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumensasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya itu.
- c. Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

4. Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi

Selama orde pemerintahan Soekarno, pendidikan demokrasi dititikberatkan pada konsep “Bhineka Tunggal Ika”, satu bahasa nasional (Indonesia), semangat anti imperialisme, dan kesetiaan pada bangsa dan Negara (Bambang Yudianto 2018 : 35). Selama orde pemerintahan Soeharto (orde Baru) pendidikan Demokrasi dimanifestasikan melalui program P4 (Pedoman penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan wawasan Nusantara. Walaupun kemudian program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim. Perkembangan berikutnya pada tahun

1998, sidang MPR mencabut Dekrit tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan menghapuskan dominasi interpretasi terhadap Pancasila.

Pendidikan demokratis untuk masyarakat Indonesia telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk melalui pendidikan formal (school based democracy education) ataupun community based democracy education yang dilaksanakan dalam masyarakat (Bambang Yudianto, 2018: 36)

a. School- Based Democracy Education

Agar masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang demokratis, maka masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang baik. Gandal dan Finn (Bambang Yudianto, 2018:37) mengatakan bahwa Pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Berkenaan dengan itu perlu dikembangkannya model School-Based Democracy yang dapat dilaksanakan paling tidak dalam empat alternatif bentuk, yaitu :

- a) Perhatian yang cermat diberikan pada the root and branches of the democratic ide atau landasan bentuk-bentuk demokratis.
- b) Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan kedalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian siswa akan

mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu.

- c) Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu.
- d) Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Ke-empat strategi tersebut sangat penting untuk program pendidikan demokrasi yang kuat di sekolah, pada berbagai level pendidikan dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi.

Pendidikan Demokrasi di Sekolah maupun perguruan tinggi dapat terlaksana salah satunya melalui mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Implementasi konsep, nilai, budaya, dan praktik demokrasi dapat dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini seperti yang di istilahkan oleh Winataputra (Wantoro 2008:216) bahwa “pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi dimana semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-cita dan nilai demokrasi diterapkan secara aktif. Dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan demokrasi dapat diberikan kepada siswa

secara formal. Sapriya dan Wahab, (2011:29) berpandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan (Civic education) merupakan perluasan dari civics yang telah menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan, oleh sebab itu maka pendidikan kewarganegaraan dapat disebut sebagai pendidikan orang dewasa (adult education) yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami peranannya sebagai warga negara. Dalam pelaksanaannya Pendidikan demokrasi di Sekolah juga dapat dilakukan melalui sosialisasi maupun praktik demokrasi secara langsung yang melibatkan seluruh peserta didik, hal itu selaras dengan pendapat Arifin (2007:14) menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan Implementasi konsep, prinsip dan nilai Demokrasi.

b. Community Based Democracy Education

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing (Toto Suharto, 2015:333) Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Pendidikan tidak hanya dilaksanakan pada jalur formal akan tetapi juga dilaksanakan pada jalur nonformal dan informal, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) “ Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan

formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

Partai politik sebagai tulang punggung dari negara demokrasi memiliki posisi yang strategis, dimana dapat melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Pendidikan demokrasi yang dimaksud adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa. Partai politik yang terbentuk bukan hanya mempunyai tujuan untuk mensejahterakan partainya saja akan tetapi juga mempunyai tanggungjawab untuk mensejahterakan kepentingan umum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota politik, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945”. Pendidikan demokrasi tentunya tidak hanya menjadi tanggungjawab pendidikan formal dan non-formal di dalam masyarakat akan tetapi juga menjadi tanggungjawab pendidikan informal yaitu pendidikan yang diberikan di dalam keluarga sejak dini, peran utama dalam pendidikan keluarga yaitu orang tua dimana orang tua harus

mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya. Mengingat pentingnya keterlibatan keluarga Davies (Danim, 2010:182) memberikan tiga tema penting dalam keterlibatan keluarga, yaitu :

- a) Membantu memastikan bahwa semua anak memiliki sarana yang mereka butuhkan untuk sukses.
- b) Mendorong perkembangan anak secara keseluruhan termasuk dimensi sosial, fisik, akademik, serta pertumbuhan dan perkembangan emosional.
- c) Mendorong tanggungjawab bersama untuk anak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan demokrasi tidak hanya untuk diajarkan melalui lembaga pendidikan formal serta lembaga nonformal lainnya, tetapi juga harus didasari dari pendidikan keluarga dimana orang tua menjadi peran utama dalam memberikan pemahaman tentang suatu hak dan kewajibanya sebagai warga negara untuk dilakukan dalam kehidupan nyata melalui tindakan dan proses.

5. Tujuan Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi merupakan suatu teori pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang memberikan kesempatan bagi siswa dan guru serta staf administrasi untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah. Dalam suatu sekolah yang demokratis, pengambilan keputusan melibatkan mereka yang akan terkena ilah keputusan tersebut. Pada tahapan yang lebih konkret, pendidikan demokratis dapat dilihat sebagai suatu pross untuk memberikan kesempatan para siswa guna

mempraktikan kehidupan yang baik di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu pendidikan demokrasi sendiri memiliki beberapa tujuan seperti pendapat dari Zamroni (2013:23):

1. Para siswa memahami bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Memberikan kesempatan para siswa mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, baik pada lokal, daerah kabupaten/kota, provinsinsi, nasional maupun pada level global
3. Para siswa memahami bagaimana dampak dan impikasi dari suatu keputusan politik, di berbagai level kehidupan politik.

Berdasarkan tujuan pendidikan demokrasi yang akan diwujudkan, maka dapat di identifikasikan bahwa pendidikan harus menekankan beberapa aspek. Aspek aspek tersebut dalam pandangan Zamroni(2013:25) antara lain, *pertama*, kurikulum dan pembelajaran pendidikan demokrasi harus menyampaikan pesan-pesan atau isi yang penting dan bermakna. Materi pembelajaran ini harus memiliki bobot yang teoristis dan dipadukan dengan realitas masyarakat sekitar. Dengan demikian, materi pendidikan demokrasi tidak sekedar informasi tanpa makna sekedar konsumsi ingatan pada diri siswa, melainkan merupakan materi yang mendorong siswa untuk mengembangkan *critical thinking* dan kemauan untuk mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, berkaitan

dengan karakteristik pertama, maka materi pendidikan demokrasi yang dibawa keruang-ruang kelas tidak hanya bersifat *pengetahuan teoritis* melainkan dipadukan *controversial issues* yang tengah merebak di masyarakat. *Ketiga*, pendidikan demokrasi memberikan pelayanan pembelajaran yang optimal kepada para siswa. *Keempat*, dilaksanakannya pendidikan ekstra kurikuler yang merupakan kegiatan yang jelas, tidak sekedar perlengkap dalam kegiatan sekolah. *Kelima*, dikembangkannya partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Pengambilan keputusan bersama hanya bisa dilakukan apabila ada partisipasi dari seluruh *stakeholders*, terutama siswa dan orang tua siswa. Partisipasi memerlukan aktivitas dari kedua belah pihak, sekolah membuka kesempatan dan mendorong *stakeholders* untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tanpa ada keterbukaan dari sekolah, tidak mungkin muncul partisipasi yang sehat. Keterbukaan sekolah juga belum ada jaminan akan muncul partisipasi yang sehat apabila *stakeholder* ada keterpaksaan. *Keenam*, dilaksanakannya simulasi proses di sekolah. Apa yang ada di masyarakat berkaitan dengan demokrasi, perlu juga dikembangkan di sekolah, sesuai dengan prinsip pendidikan. Kalau di masyarakat ada sistem pemerintahan dan lembaga pemerintahan, maka di sekolahpun perlu dikembangkan sistem dan keberadaan pemerintah siswa. Apabila di masyarakat ada perundang dan peraturan maka di sekolah pun perlu dikembangkan perundangan dan peraturan. Dengan prinsip bahwa sekolah adalah kehidupan itu sendiri bagi siswa, maka perbedaan sistem dan praktik

politik yang ada di sekolah akan merupakan kesempatan bagi para siswa untuk melibatkan dalam kehidupan dan proses politik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan pendidikan demokrasi ketika ingin terwujudnya suatu pendidikan demokrasi harus melihat dari enam aspek yang nantinya dapat diterapkan dalam pendidikan di sekolah.

6. Manfaat Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi tidak hanya memiliki tujuan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Di dalam pendidikan demokrasi ini juga terdapat beberapa manfaat pendidikan demokrasi yang dikemukakan oleh Jurnal Alif Cahya (2009:84) bahwasanya :

- a. Pendidikan demokrasi merupakan kebutuhan hidup dan mengartikan pendidikan sebagai bentuk transmisi yang dilakukan melalui komunikasi. Hal tersebut tidak lepas pandangan bahwa hidup itu sendiri pada dasarnya adalah proses perbaikan diri. Maka kelestarian hidup itu hanya dapat dijaga dengan perbaikan yang konstant.
- b. Pendidikan Demokrasi sebagai fungsi sosial. Masyarakat dalam pendidikan tidak hanya sebagai sebuah tempat dan perantara interaksi watak seorang dengan lingkungan saja, melainkan keseluruhan aktifitas seseorang terutama dalam melakukan aktifitas fisik sebagai pengaruh salah seorang kelompok tersebut yang mengacu kepada perubahan yang gradual tersebut.

c. Pendidikan demokrasi sebagai Pembangunan. Kekuuataan belajar dari makna-makna yang berasal dari pengalaman adalah hasil dari suatu kebiasaan. Kebiasaan dalam mengasah sense merupakan kapasitas aktif untuk mengatur aktivitas yang akan membawa perkembangan kemampuan individu dan kelompok. Dan salah satu bentuk pertumbuhan tersebut adalah yang mana kriteria nilai dari pendidikan persekolahaan merupakan perluasan dalam membuat efektifitas hasrat seseorang secara nyata.

Impian adanya pendidikan bermutu hanya dapat diwujudkan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Suatu tatanan masyarakat yang telah memiliki sistem yang mengatur segala kegiatan dengan baik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam hal ini pendidikan memberikan manfaat yang lain diantaranya: 1). Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. 2). Setiap manusia memeiliki perubahan kearah pemikiran yang sehat. 3). Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Pendidikan demokrasi menjamin nilai-nilai persaudaraan dan hak manusia dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati. Dari hal tersebutlah bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan

sempurna. Sedangkan poin ketiga dari manfaat tersebut mengacu pada asumsi bahwasanya kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama.

C. Tinjauan Ikatan Pelajar Muhammadiyah

1. Sejarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitanya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari bantaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsupng penyempurna perjuangan Muhammadiyah. (Sumber data mengenai sejarah IPM (Azaki:12)

Upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi Pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tahun 1961. Pada tahun 1919 didirikan Siswo Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Mu'allimn Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1926, di

Malang dan Surakarta berdiri GKPM (Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah). Selanjutnya pada tahun 1933 berdiri Hizbul Wathan yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah.

Setelah tahun 1947, berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas mulai mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari Muhammadiyah sendiri. Pada tahun 1950, di Sulawesi (di daerah Wajo) didirikan Ikatan pelajar Muhammadiyah, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Pada tahun 1954, di Yogyakarta berdiri GKPM yang berumur 2 bulan karena dibubarkan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 GKPM kembali didirikan di Yogyakarta, tetapi dibubarkan juga oleh Muhammadiyah (yaitu Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah). Setelah GKPM dibubarkan pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudiain merencanakan dan mengadakan musyawarah Se-Jawa Tengah. Akan tetapi upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah, bahkan para aktivisnya diancam akan dikeluarkan dari Sekolah Muhammadiyah bila tetap akan meneruskan rencananya. Pada tahun 1957 juga berdiri IPSM (Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah) di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri.

Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesi yang terjadi

pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan sebuah background politik umat Islam secara keseluruhan. Ketika Partai Islam MASYUMI berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi (yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Panca Cita) yang berisikan tentang satu kesatuan menurut Ideologi IPM (Azaki:13) bahwa :

- a. Umat Islam bersatu dalam satu partai Islam, yaitu Masyumi
- b. Satu gerakan Mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- c. Satu gerakan pemuda Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)
- d. Satu gerakan pelajar Islam, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII)
- e. Satu kepanduan Islam, yaitu Pandu Islam (PI)

Kesepakatan bulat organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi yang kemudian diikuti oleh NU pada tahun 1952. Sedangkan Muhammadiyah tetap bertahan di dalam Masyumi hingga Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi akhirnya menjadi mainstream yang kuat bahwa deklarasi Panca Cita hendaknya ditegakkan demi kesatuan umat Islam Indonesia. Di samping itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya kantong-kantong angkatan

Muda Muhammadiyah seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyyatul ‘Aisyiyah, yang cukup bisa mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah. (Azaki:14)

Melalui kegigihan dan kemantapan para aktivis pelajar Muhammadiyah pada waktu itu untuk membentuk Organisasi Kader Muhammadiyah di kalangan pelajar akhirnya mulai mendapatkan titik-titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilannya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah Daerah di Garut berusaha melindungi aktivitas para pelajara Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Mulai saat itulah upaya pendirian organisasi Pelajar Muhamamdiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematis. Pembicaraan-pembicaraan mengenai perlunya berdiri organisasi pelajar Muhammadiyah banyak dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Melalui keputusan Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut tersebut akhirnya diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhamadiyah (Keputusan II/No.4). Keputusan dalam Ideologi IPM (Azaki:14) tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Muktamar Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran supaya memberi

kesempatan dan menyerahkan kompetensi pembentukan IPM kepada PP Pemuda Muhammadiyah.

- b. Mukthamar Pemuda Muhammadiyah mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari pembahasan-pembahasan mukthamar tersebut, dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan pendapat dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran .

Kata sepakat akhirnya dapat tercapai antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang Organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan tersebut dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani bersama antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis, Pendidikan dan Pengajaran. Rencana Pendiriain IPM tersebut dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961, dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Perkembangan IPM akhirnya bisa memperluas jaringan sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Pimpinan IPM (tingkat ranting) didirikan di setiap sekolah Muhammadiyah. Berdirinya Pimpinan IPM di sekolah-sekolah

Muhammadiyah ini akhirnya menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam UU Ke-Ormas-an, bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Sementara di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Dengan demikian, ada dualisme Organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan pada Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu (Akbar Tanjung) secara khusus dan implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM, agar IPM melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah. (Azaki : 15)

Dalam situasi kontraproduktif tersebut, akhirnya Pimpinan Pusat IPM membentuk tim eksistensi yang bertugas secara khusus menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dilakukan pengkajian yang intensif, tim eksistensi ini merekomendasikan perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Perubahan ini bisa jadi merupakan sebuah peristiwa yang tragis dalam sejarah organisasi, karena perubahannya mengandung unsur-unsur kooptasi dari pemerintah. Bahkan ada yang menggap bahwa IPM tidak memiliki jiwa Heroisme sebagaimana yang dimiliki oleh PII yang tetap tidak mampu mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya.

Namun sesungguhnya perubahan nama tersebut meruoakan blessing in disguise (rahmat tersembunyi). Perubahan nama IPM ke IPM

sebenarnya semakin memperluas jaringan dan jangkauan organisasi ini yang tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis pelajar yang lain seperti santri, anak jalanan, dan lain-lain.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat IPM Nomor VI/PP.IPM/1992, yang selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dengan demikian, secara resmi perubahan IPM menjadi IPM adalah sejak tanggal 18 November 1992. (Azaki:15)

2. Visi dan Misi

Setelah melihat latar belakang dan sejarah perjuangan IPM, sebagaimana tergambar di Mukadimah, maka Visi yang harus terbangun dalam buku Ideologi IPM (Azaki: 16) untuk menata perjuangan IPM ke depan ialah:

- a. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi ke-Islaman.

Visi Keislaman tersebut dimaknai sebagai pengakuan IPM bahwa Islam adalah agama yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh umat manusia. Islam tersebut secara normatif mengandung nilai-nilai perubahan yang konstruktif di setiap tempat dan masa. Dan visi ini dipakai untuk mengonstruksi masa depan perjuangan IPM, sehingga benar-benar

terwarnai oleh nilai hakiki ajaran Islam sebagai ajaran wahyu yang selalu cenderung kepada kebenaran dan membawa keselamatan.

- b. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi keilmuan

Visi keilmuan IPM didasari pada pandangan mendasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap Ilmu Pengetahuan. Pandangan tersebut berakar pada keyakinan bahwa pada hakikatnya sumber ilmu di dunia ini adalah ALLAH SWT. Konsekuensinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan harus berawal dan mendapat kontrol dari sikap pasrah dan tunduk kepada ALLAH SWT.

- c. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi kemasyarakatan.

Visi kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita-cita pengetahuan masyarakat sipil. Karena dengan masyarakat madani dapat dibangun konstruksi negara nasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan serta mengupayakan partisipasi penuh segenap elemen bangsa dengan kemajemukan dan keanekaragaman potensi.

- d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi kekaderan

Visi kaderisasi dalam gerakan IPM bermakna bahwa IPM tidak bisa mengingkari kodratnya sebagai organisasi generasi muda penerus

massa depan baik di lingkungan Muhammadiyah maupun bangsa Indonesia ini.

Penegasan ini juga merupakan wujud kesadaran IPM tentang pentingnya kadersiasi.

Setelah terbangun visi gerakan sebagaimana tersebut diatas, maka gerakan IPM membawa misi sebagai berikut:

a. Memperjuangkan nilai-nilai ke-Islaman

Implementasi ajaran Islam dalam misi gerakan IPM tercermin dari keberpihakan IPM kepada kebenaran dan pembaharuan dengan menitikberatkan pada penyantunan pelajar dan pelajar, kontribusi dalam transformasi masyarakat dan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kerangka dasar gerakan IPM terdiri dari:

- a. Ajaran Islam sebagai sumber nilai inspirasi dan motivasi dalam menentukan visi gerakan IPM
- b. Dalam misi gerakan IPM terdapat nilai dasar yang dipakai sebagai substansi dari misi tersebut yaitu kebenaran dan pembaharuan. Kebenaran mengandung semangat moral dan ilmiah, sedangkan pembaharuan mengandung semangat jihad, ijtihad dan mujahadah.

b. Membangun Tradisi Keilmuan

Ikatan Pelajar Muhammadiyah membawa misi keilmuannya kepada tatanan kehidupan yang manusiawi dan beradab serta jauh dari tatanan

kehidupan yang sekularistik, hedonistik dan mekanistik (merupakan implikasi serius dari perkembangan IPTEK sekarang ini). Pelajar muslim sebagai objek dan subjek dalam gerakan IPM dalam mengembangkan potensi keilmuannya harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Potensi keilmuan pelajar dapat dikembangkan dikembangkan dalam komunitas yang memiliki tradisi keilmuan. Dalam membangun tradisi keilmuan didasarkan pada asumsi dan prinsip antara lain :

- a. Ilmu pengetahuan harus dikuasai untuk mendapatkan kedudukan sebagai manusia terhormat dan berkualitas dihadapan Allah SWT
 - b. Semangat menggali Khazanah keilmuan harus dibarengi dengan eksplorasi spiritualitas, sehingga tidak melahirkan karakter manusia berilmu yang sekular
 - c. Dengan ilmu pengetahuan perspektif pelajar tentang realitas sosial menyatu dengan perspektifnya tentang Tuhan/ Agama.
- c. Membentuk Masyarakat Beradab
- Masyarakat beradab adalah masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya manusia beradab secara sosial politik juga dikatakan sebagai masyarakat yang mandiri dan terberdaya, kondisi masyarakat yang demikian itulah yang diperjuangkan oleh IPM dengan potensi kader-kadernya.
- d. Menciptakan Kader Tangguh

Amanat Mukhtamar XII merujuk kepada hasil Semiloka Kader tahun 2002 serta rumusan Sistem Perkaderan IPM (Hijau) mengarahkan fokus dan konsentrasi serta prioritas setiap level organisasi IPM melaksanakan perkaderan dengan benar dan sesungguhnya. SPI hijau merupakan salah satu metodologi pembacaan IPM terhadap kebutuhan masa kini. (Ideologi IPM, 2016:16)

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam proses penulisan skripsi penulis mendapatkan kajian yang relevan yang membahas tentang Pendidikan Demokrasi dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Sebagai berikut :

1. Di dalam Jurnal yang ditulis oleh harmita Dian Nasiti, Totok Suyanto dengan judul Impelementasi nilai-nilai Demokrasi dalam kegiatan Intra Sekolah di SMA Khadijah Surabaya. Untuk Jurnal ini beliau menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data diambil dan dilakukan dengan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini bahwasanya OSIS di SMA Khadijah Surabaya sudah menerapkan pendidikan demokrasi dengan sangat baik dalam kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, kebebasan mengutarakan pendapat terorganisir dengan baik baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil putusan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

2. Di dalam Skripsi yang ditulis oleh Agus Reza Suyono dengan Judul Praktik Nilai-Nilai Demokrasi dalam kegiatan berorganisasi di sekolah pada siswa pengurus OSIS. Dalam Skripsi ini tujuannya yakni untuk mengetahui praktik nilai-nilai demokrasi dalam berorganisasi di Sekolah pada siswa pengurus OSIS tahun 2015/2016 di SMA Negeri 2 Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan prosedur penelitan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah menentukan judul, menentukan pendekatan dan jenis penelitian, menentukan tempat penelitian, menentukan sumber data, triangulasi, melakukan analisis data dan penyusunan laporan. Hasil dari penelitian ini bahwasanya kebebasan berpendapat, kesetaraan antar warga sekolah, rasa percaya dan kerjasama, kesetaraan antar warga sekolah dapat dilihat dari kesempatan yang sama bagi siswa-siswi untuk menjadi pengurus OSIS.
3. Di dalam Skripsi yang ditulis oleh Nurbarani Dwi Koswara, 2016 dengan judul “ Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi mahasiswa (Studi deskriptif pada Himpunan Mahasiswa Jurusan PKn di FKIP UNPAS Bandung). Hasil penelitian tersebut bahwasanya mengemukakan praktik budaya demokrasi dalam Himpunan Mahasiswa PKn H dikatakan dengan baik karena merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung seperti halnya adanya kerjasama, musyawarah yang adil dan

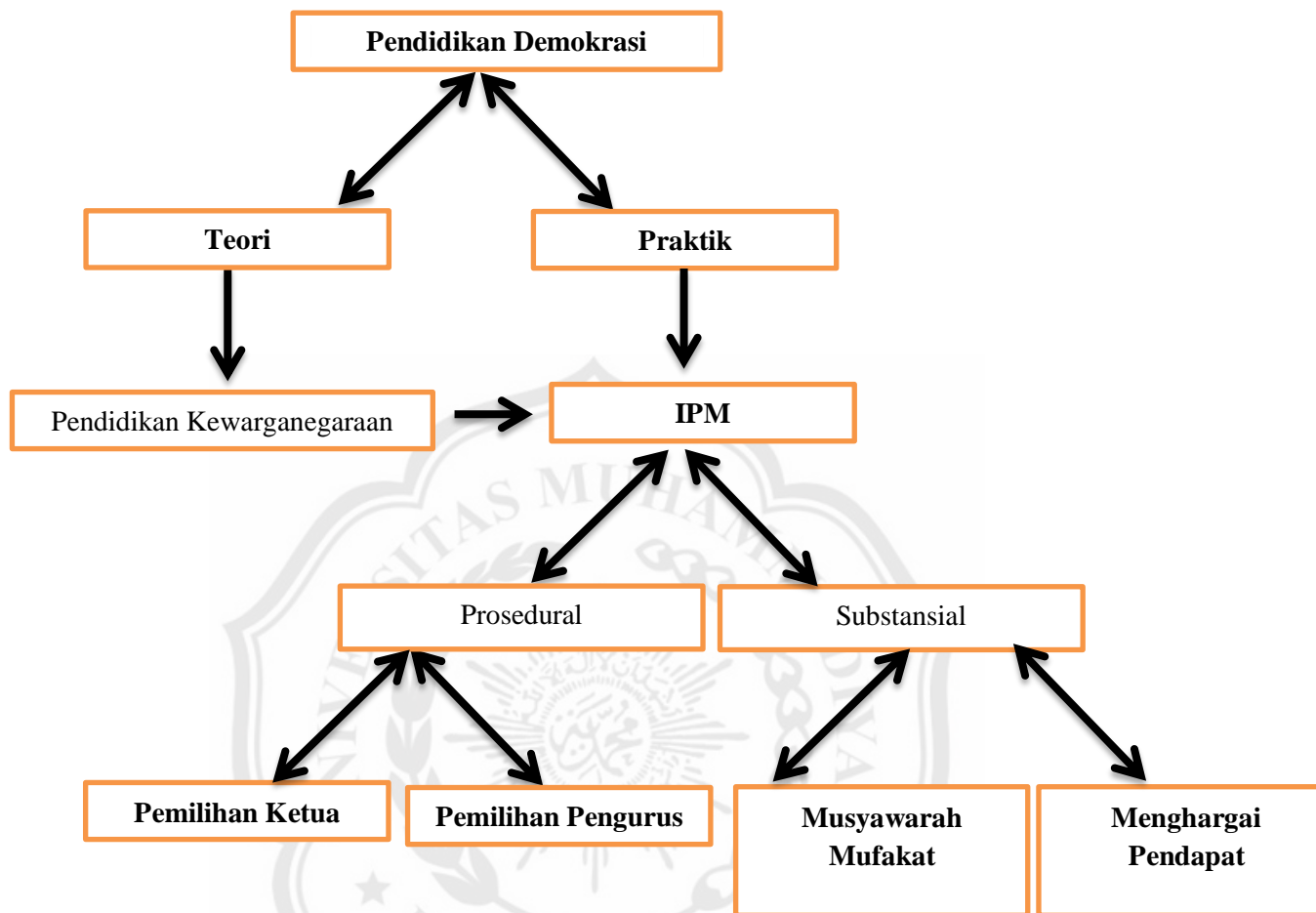
mufakat, menerima perbedaan ras, sukum agama, memiliki hak dipilih dan memilih. Dengan kata lain, kebiasaan sikap dan perilaku tersebut telah menjadi budaya mahasiswa yang lebih demokratis. Hasil selanjutnya Program nilai-nilai demokrasi di himupunan mahasiswa ialah pemira, dialog mahasiswa, kotak aspirasi, kajian demokrasi dan civic education.

4. Di dalam Skripsi Resti Alvian Frydyana dengan judul Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi kesiswaan (studi deskriptif di SMA Negeri 1 Lembang). Hasil penelitian ini merujuk kepada praktik pendidikan demokrasi yang sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan mengandung nilai-nilai yang terdapat di dalam demokrasi, kemudian peranan pengurus organisasi kesiswaan bukan sebagai pengurus saja melainkan sebagai motivator, mediator dan koordinator.
5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Anton Aulawi dan Srinawati dengan judul” Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan organisasi untuk meningkatkan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMK Darus Syifa Kota Cilegon. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya proses pengambilan keputusan merupakan hal yang terpenting dalam berorganisasi untuk mendapat solusi yang terbaik karena mengambil keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan ssebagai alat, cara pemecahan masalah menghasilkan satu pilihan final dalam berorganisasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipaparkan bahwa proses

pengambilan keputusan yang dapat di terapkan dalam OSIS diantaranya adalah persetujuan mayoritas tertentu, prosedur dengan persetujuan kelompok minoritas dan persetujuan kelompok minoritas tertentu.



E. Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Kerangka berpikir

F. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengertian Pendidikan Demokrasi ?
2. Apa yang di maksud dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ?
3. Bagaimana organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri?
4. Bagaimana Dinamika Praktik Pendidikan Demokrasi di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah ?
5. Bagaimana kegiatan pendukung pendidikan demokrasi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ?
6. Bagaimana Praktik Pendidikan Demokrasi di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah ?
7. Bagaimana hambatan dalam pendidikan demokrasi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ?
8. Bagaimana Upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan demokrasi di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah ?
9. Apakah dalam melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan praktek pendidikan demokrasi sudah berjalan dengan baik ?
10. Adakah peran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dalam praktik pendidikan demokrasi?
11. Bagaima peran cabang ikatan pelajar muhammadiyah berperan dalam hal praktik pendidikan demokrasi di ranting ?